JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v8i1.9451
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 13 Juli 2026 | **Revised:** 18 Agustus 2026 | **Accepted:** 04 September 2026

Analisis Keberhasilan Usaha Peternakan Unggas di Kota Payakumbuh dari Perspektif Ekosistem Kewirausahaan

Agusman Sassiko[1], Syafrizal Syafrizal[2], Donard Games[3]
[1]Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, agussassiko12@gmail.com
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, syafrizal@eb.unand.ac.id
[3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, donardgames@eb.unand.ac.id

Corresponding Author: agussassiko12@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to analyze the factors influencing the success of poultry farming businesses in Payakumbuh City from the perspective of the entrepreneurial ecosystem. The research employed a qualitative descriptive approach. Five poultry entrepreneurs were purposively selected as research informants based on their experience in managing poultry businesses. Data were collected through structured interviews, field observations, and documentation, and subsequently analyzed using Thematic Analysis supported by NVivo 15 software. The findings indicate that the success of poultry farming businesses is influenced by two major dimensions of the entrepreneurial ecosystem: institutions and resources. Within the institutional dimension, government policies have provided support through feed assistance, training programs, Business Identification Number (NIB) facilitation, and tax administration incentives. However, the implementation remains uneven due to limited information dissemination and the lack of program continuity. The digitalization of licensing services through the Online Single Submission (OSS) system and the Public Service Mall (MPP) has improved business licensing efficiency, although bureaucratic complexity, regulatory synchronization, and lengthy technical licensing processes remain significant challenges. Entrepreneurial culture in Payakumbuh has developed positively, reflected by increasing entrepreneurial interest among the community. Nevertheless, the contributions of educational institutions and business incubators remain limited because their support is temporary and not specifically focused on the poultry sector. Law enforcement is generally perceived positively, although entrepreneurs still expect greater transparency, procedural certainty, and faster public services. From the resource dimension, transportation infrastructure, electricity, and internet access adequately support business operations. Human resource quality, farming experience, and technological adaptability are critical factors in improving productivity. Access to formal financing, particularly People's Business Credit (KUR), has supported business development, although administrative requirements, collateral, and limited financial literacy remain major obstacles. The adoption of digital technology has improved production efficiency, administrative management, and marketing activities, despite varying levels of technological utilization among entrepreneurs. Furthermore, broader market access and strong business networks involving suppliers, customers, partner companies, and poultry farming communities have strengthened competitiveness and business sustainability. This study*

concludes that the success of poultry farming businesses is determined not only by entrepreneurs' internal capabilities but also by the quality of the entrepreneurial ecosystem. Strong synergy among government policies, institutional support, infrastructure, human resources, financing, technology, market access, and business networks is essential for fostering sustainable business development. Strengthening collaboration among stakeholders is therefore crucial to developing a more effective and sustainable entrepreneurial ecosystem for poultry farming businesses in Payakumbuh City.

Keyword: *Entrepreneurial Ecosystem, Business Success, Poultry Farming, Institutions, Resources, Payakumbuh City.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha peternakan unggas di Kota Payakumbuh dari perspektif ekosistem kewirausahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sebanyak lima pelaku usaha peternakan unggas yang memiliki pengalaman dalam mengelola usahanya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan *Thematic Analysis* dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan usaha peternakan unggas dipengaruhi oleh dua dimensi utama ekosistem kewirausahaan, yaitu institusi dan sumber daya. Pada dimensi institusi, kebijakan pemerintah telah memberikan dukungan melalui bantuan pakan, pelatihan, pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kemudahan administrasi perpajakan, namun implementasinya belum merata akibat keterbatasan informasi dan keberlanjutan program. Digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) mempercepat proses legalitas usaha, meskipun masih terdapat kendala birokrasi, sinkronisasi regulasi, dan lamanya proses perizinan teknis. Budaya kewirausahaan di Kota Payakumbuh menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha, sementara kontribusi lembaga pendidikan dan inkubator bisnis masih belum optimal karena bersifat sementara dan belum spesifik pada sektor peternakan. Persepsi terhadap kualitas penegakan hukum relatif baik, meskipun pelaku usaha masih mengharapkan peningkatan transparansi, kepastian prosedur, dan percepatan pelayanan. Pada dimensi sumber daya, infrastruktur transportasi, listrik, dan internet dinilai cukup mendukung operasional usaha. Kualitas sumber daya manusia, pengalaman beternak, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Akses terhadap pembiayaan formal, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah membantu sebagian pelaku usaha, namun persyaratan administrasi, agunan, dan keterbatasan literasi keuangan masih menjadi hambatan utama. Pemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan efisiensi produksi, administrasi, dan pemasaran, meskipun tingkat adopsinya masih bervariasi. Selain itu, akses pasar yang luas serta jaringan usaha dengan pemasok, pelanggan, perusahaan mitra, dan komunitas peternak terbukti memperkuat daya saing serta keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha peternakan unggas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal pelaku usaha, tetapi juga oleh kualitas ekosistem kewirausahaan yang mendukung melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, akses pasar, dan jaringan usaha. Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pengembangan usaha peternakan unggas di Kota Payakumbuh.

Kata Kunci: Ekosistem Kewirausahaan, Keberhasilan Usaha, Peternakan Unggas, Institusi, Sumber Daya, Kota Payakumbuh.

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia (Yolanda & Hasanah, 2024). Menurut website resmi (Kadin Indonesia, 2023) menyatakan pelaku UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Selain itu, pelaku usaha UMKM sudah mencapai sekitar 66 juta. Dalam hal kontribusi, UMKM telah menyumbangkan 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp 9.850 triliun. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa UMKM telah menyerap sekitar 117 juta pekerja atau setara 97% dari total tenaga kerja (Mulyaningtyas *et al.,* 2024).

Dalam konteks kewirausahaan modern, keberhasilan suatu usaha tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil dari kemampuan internal pelaku usaha, melainkan sebagai output dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu ekosistem kewirausahaan. Ekosistem kewirausahaan adalah seperangkat aktor kewirausahaan yang saling terhubung (baik calon maupun wirausahawan yang sudah ada), organisasi kewirausahaan (perusahaan, *modal ventura*, *angel investor*, *bank*), institusi (universitas, lembaga pemerintah, badan keuangan), dan proses kewirausahaan yang secara formal dan informal bersatu untuk menghubungkan, memediasi, dan mengatur kinerja dalam lingkungan kewirausahaan lokal (Mason & Brown, 2014).

Namun demikian, dalam praktiknya, pengembangan UKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam ekosistem kewirausahaan, terutama yang berkaitan dengan aspek institusi dan sumber daya. Dalam penelitian ini, ekosistem kewirausahaan dipahami sebagai kombinasi antara sumber daya dan institusi yang saling berinteraksi dalam mendukung aktivitas kewirausahaan. Institusi mencakup kebijakan pemerintah, pajak, perizinan, birokrasi, budaya kewirausahaan, keberadaan universitas dan inkubator bisnis, serta kualitas penegakan hukum dan tingkat korupsi. Sementara itu, sumber daya meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, pendidikan, akses pasar serta jaringan atau modal sosial yang mendukung aktivitas kewirausahaan.

Dari penilaian *Global Entrepreneurship index* yaitu indeks aktivitas ekonomi yang disusun oleh *Global Entrepreneurship and Development Institute* melihat bagaimana masing – masing Negara di dunia mengalokasikan sumber daya untuk mempromosikan kewirausahaan menghasilkan penilaian bahwa kualitas dan dinamika ekosistem kewirausahaan Indonesia masih berada pada posisi ke-94 dari 137 negara di dunia berada jauh dengan tetangganya seperti Thailand pada peringkat 71, Malaysia pada peringkat 58, terlebih singapura pada peringkat 27 (Armando & Chandra, 2020). Pemerintah memandang perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM guna mendorong aktivitas kewirausahaan yang saat ini masih rendah, yakni hanya sekitar 3,47%. Capaian ini cukup rendah bila dibandingkan dengan target pemerintah yaitu rasio kewirausahaan sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% di 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen yang berarti masih terdapat sekitar 25% UMKM belum terakses layanan keuangan formal. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen (OJK, 2024).

Trend populasi unggas di Provinsi Sumatera Barat, termasuk ayam petelur dan ayam pedaging, telah mengalami dinamika selama beberapa tahun terakhir dengan peningkatan produksi di daerah seperti Kabupaten Limapuluh Kota yang mencakup wilayah Payakumbuh, menandakan adanya basis produksi unggas yang kuat sebagai bagian dari kemajuan ekonomi regional. Untuk melihat gambaran distribusi dan perbandingan populasi unggas di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat, berikut disajikan data populasi unggas menurut kabupaten/kota.

Tabel 0. Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenisnya Di Kota/Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2024

Kab/Kota	Populasi Unggas (Ekor)			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
	2024	2024	2024	2024
Sumatera Barat	4994502,23	11916055,98	53742111,86	1287799
Kab.Kep.Mentawai	87155,43	0	69219,75	3259,65
Kab.Pesisir Selatan	864313,27	52914,26	1958136,47	91017,44
Kab.Solok	320852,03	25024,27	3799220,48	70179,67
Kab.Sijunjung	156876,81	182422,17	1825812,07	18734,64
Kab.Tanah Datar	254763,45	896803,04	1193730,25	79487,91
Kab.Padang Pariaman	832839,89	2680941,82	5430054,97	63574,69
Kab.Agam	397462,67	167119,31	3254750,64	93359,99
Kab.Lima Puluh Kota	547455,46	6282787,52	16822710,59	105862,62
Kab.Pasaman	193153,06	22556,42	2422805,01	26797,51
Kab.Solok Selatan	153477,68	13907,19	213974,88	22538,9
Kab.Dharmasraya	103107,85	35941,78	4595320,9	10458,39
Kab.Pasaman Barat	368736,41	329041,39	1405915,74	17525,25
Kota Padang	380922,14	326319,45	5191726,37	59799,71
Kota Solok	117885,8	3197,91	843216,66	12341,77
Kota Sawahlunto	65031,39	34960,1	207866,8	11397,98
Kota Padang Panjang	29880,59	0	0	2518,73
Kota Bukittinggi	5451,37	0	23147,12	949,67
Kota Payakumbuh	32821,13	861006,28	3490082,08	61772,73
Kota Pariaman	82315,8	1113,07	994421,08	6523,21

Sumber: BPS Sumatera Barat 2025

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan populasi unggas antar daerah di Sumatera Barat. Beberapa daerah menunjukkan jumlah populasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang mencerminkan adanya pusat-pusat produksi unggas di wilayah tertentu. Usaha peternakan unggas yang cukup menjanjikan bagi perekonomian daerah adalah di Kota Payakumbuh. menjadi daerah yang termasuk populasi ternak unggas terbesar di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui usaha peternakan. Terbukti dari data BPS Kota Payakumbuh Tahun 2023 setiap kecamatan memiliki populasi unggas yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.2

Tabel 2. Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenisnya Di Kota Payakumbuh Tahun 2022

Kecamatan	Populasi Unggas				
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila	Puyuh
	2022	2022	2022	2022	2022
Payakumbuh Barat	4.297	82.579	536.400	2.993	-
Payakumbuh Selatan	1.689	63.800	201.500	14.569	395
Payakumbuh Timur	6.947	329.600	823.200	17.940	915
Payakumbuh Utara	3.879	125.800	454.300	16.416	19
Lamposi Tigo Nagori	7.049	499.500	837.137	31.412	714

Sumber: BPS Kota Payakumbuh 2023

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa Kota Payakumbuh berpotensi sebagai daerah yang memiliki peternakan unggas yang cukup besar, terutama pada peternakan ayam pedaging dengan angka yg sangat besar. Di Kota Payakumbuh, dorongan terhadap pengembangan peternakan unggas tidak hanya bersifat produksi saja tetapi juga kelembagaan dengan keterlibatan program *corporate desa* dan bantuan modal berupa itik bagi kelompok tani setempat, yang secara potensial memperkuat jaringan usaha dan akses permodalan bagi peternak unggas dalam lima tahun terakhir (Antara News, 2021). Kesuksesan usaha merupakan pencapaian yang sangat di harapkan dari usaha peternakan unggass di Kota Payakumbuh. Keberhasilan menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik dari kondisi pencapaian usaha sebelumnya. Untuk menghindari kemunduran dalam bisnis peternakan unggas di Kota Payakumbuh, pelaku usaha perlu mengetahui ekosistem kewirausahaan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu peternak unggas, serta mitra pemasaran di Kota Payakumbuh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan transkripsi, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keberhasilan usaha peternakan unggas dari perspektif ekosistem kewirausahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Analisis Keberhasilan Usaha Peternakan Unggas Di Kota Payakumbuh Dari Perspektif Ekosistem Kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keberhasilan usaha peternakan unggas dari perspektif ekosistem kewirausahaan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memahami fenomena bisnis yang kompleks melalui pengumpulan data berupa kata-kata atau gambar (Sekaran & Bougie, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Pembahasan

A. Institusi

1. Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Kebijakan pemerintah di Kota Payakumbuh dinilai memiliki niat baik untuk mendukung UMKM dan usaha peternakan, namun efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh keberlanjutan dan penyebaran informasi yang tidak merata. Sejalan dengan penelitian Akmalia et al., (2025) mengatakan pengelolaan yang efektif menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan, kebijakan pemerintah, dan tren ekonomi juga memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan usaha.

Informan 2 dan 3 sama sekali belum pernah menerima bantuan modal, pelatihan, ataupun pendampingan. Hal ini disebabkan oleh distribusi informasi program pemerintah yang belum optimal dan umumnya hanya menyebar lewat media sosial atau cerita antar-pelaku usaha. Meskipun demikian, kebijakan baru seperti program *Makan Bergizi Gratis* dinilai Informan 3 berpotensi besar membuka peluang pasar telur baru. Informan 4 mendapatkan insentif non-fiskal berupa pelatihan pengembangan kapasitas dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan Informan 5 pernah menerima keringanan administrasi perpajakan yang sangat membantu menjaga stabilitas usaha pada masa pandemi. Temuan penelitian ini menunjukan kebijakan pemerintah merupakan faktor

yang sangat penting bagi kesuksesan usaha, seperti dukungan langsung, dukungan finansial dan nonfinansial serta melalui dukungan kebijakan tidak langsung (Prasannath, 2024)

2. Perizinan dan Birokrasi

Digitalisasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Payakumbuh diakui membawa kemajuan besar. Meski demikian, birokrasi masih menjadi faktor penghambat utama (terutama bagi peternak skala kecil/rumahan) karena beberapa kendala operasional seperti Kompleksitas Prosedur yaitu Alur administrasi dinilai masih panjang dan rumit. Istilah-istilah teknis dalam sistem *online* sulit dipahami peternak kecil tanpa bantuan mandiri. Sinkronisasi regulasi antarinstansi dimana Informan 5 menyoroti adanya tumpang tindih aturan. Persyaratan yang sudah selesai di satu level administrasi terkadang harus disesuaikan kembali dengan aturan lingkungan dan distribusi di instansi lain, khususnya saat melakukan ekspansi kandang baru. Pengurusan izin tingkat kabupaten relatif cepat, namun izin yang melibatkan level provinsi/pusat membutuhkan durasi panjang akibat verifikasi lapangan dan alur berjenjang. Pelayanan juga kerap melambat karena adanya permintaan dokumen tambahan secara mendadak di tengah proses. Masih ada kesan dari informan bahwa pelaku usaha yang memiliki relasi atau jaringan internal di instansi tertentu mendapatkan tindak lanjut pelayanan yang lebih cepat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Dimana tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*/EODB) masih dianggap menyulitkan dan rumit bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN lainnya (Akhmaddhian, 2014).

3. Perpajakan (Pajak)

Persepsi terhadap pajak di Kota Payakumbuh terbagi berdasarkan skala usaha dan tingkat literasi keuangan peternak. Informan 1 dan 4 (skala menengah) menilai tarif pajak saat ini wajar dan adil karena mekanismenya mengikuti laba bersih usaha. Sebaliknya, Informan 2, 3, dan 5 menilai pajak terasa sangat mahal dan memberatkan. Persepsi "mahal" ini muncul akibat pendapatan usaha peternakan yang fluktuatif (sensitif terhadap penurunan harga telur) dan tingginya biaya operasional harian.

Mayoritas informan (Informan 1, 4, dan 5) mengapresiasi digitalisasi pembayaran pajak secara *online* karena memangkas waktu pengurusan. Kendala teknis yang tersisa hanyalah sistem yang terkadang *error* saat pelaporan. Peternak kecil (Informan 2 dan 3) sering menunda pengurusan pajak karena tidak tahu cara menghitung dan melaporkan pajak secara benar. Sementara bagi peternak yang lebih mapan (Informan 4 dan 5), kendala utamanya adalah hambatan internal berupa kedisiplinan pencatatan keuangan harian/arus kas peternakan yang bergerak sangat dinamis. Sejalan dengan itu di negara maju, kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, penyederhanaan regulasi, serta adanya insentif pajak bagi usaha kecil terbukti memberikan dampak positif dalam perkembangan usaha, Nany Librianty (2025).

4. Budaya Kewirausahaan, Dukungan Lembaga Pendidikan, dan Inkubator Bisnis

Budaya mandiri dan karakter masyarakat Payakumbuh yang terbiasa berdagang mendorong tingginya minat berwirausaha, termasuk ketertarikan generasi muda pada peternakan modern dan *digital marketing*. Namun, tingkat keberanian mengambil risiko untuk ekspansi (seperti menambah populasi ternak/kandang) masih dibatasi oleh ketakutan terhadap fluktuasi harga pakan dan ketidakpastian pasar ekonomi. Hasil penelitian Dwi Gemina *et al.* (2022) menunjukan Budaya kewirausahaan dan keberanian mengambil resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha UMKM.

Universitas dan sekolah kejuruan peternakan di Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh dinilai berkontribusi nyata. Lembaga pendidikan berkontribusi memberikan inovasi teknologi produksi, pengelolaan limbah, riset pakan alternatif, serta penyediaan program magang mahasiswa yang membawa wawasan baru ke peternakan rakyat. Namun, kerja sama ini umumnya masih bersifat jangka pendek dan belum menjadi pendampingan

berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Universitas dituntut untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional dan mentransfer pengetahuan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Selly Novela e*t al.,*2021)

Menurut (Judijanto et al., 2025) bahwa Program inkubasi bisnis sangat penting dalam keberhasilan perusahaan rintisan dengan menyediakan sumber daya penting, bimbingan, dan peluang jaringan, membantu para wirausahawan menavigasi kompleksitas operasi bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. Di Kota Payakumbuh Peran inkubator bisnis formal pemerintah dirasa belum optimal dan belum spesifik menyentuh sektor peternakan (lebih banyak berfokus pada sektor *startup* kuliner/UMKM umum). Akibatnya, transfer pengetahuan teknis dan mentoring di Payakumbuh masih didominasi oleh jalur informal, seperti *farm meeting* yang diadakan oleh perusahaan mitra pakan peternakan serta forum berbagi pengalaman antar peternak senior.

5. Penegakan Hukum dan Tingkat Korupsi

Secara umum, situasi keamanan fisik di Kota Payakumbuh dinilai kondusif, tetapi aspek kepastian hukum formal dan biaya non-operasional masih memerlukan perhatian khusus. Kepemilikan izin usaha (legalitas formal) diakui menjadi tameng perlindungan utama bagi peternak. Namun, rasa aman usaha belum sepenuhnya stabil karena masih adanya potensi konflik sosial/gangguan dari masyarakat sekitar terkait dampak operasional lingkungan kandang peternakan unggas.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerasan adalah salah satu dari 7 kelompok tindak pidana korupsi. Dalam kontek penelitian ini para informan tidak menemukan adanya kasus korupsi, praktik suap, atau penyalahgunaan wewenang aparat yang mencolok dalam prosedur pelayanan resmi. Biaya resmi perizinan pun sudah transparan dan relatif gratis. Namun, hambatan justru muncul dari tekanan informal eksternal. Informan 1 dan 2 secara terbuka mengakui adanya pungutan liar/permintaan bantuan berkala (seperti meminta "jatah" uang keamanan atau sumbangan produk telur satu sak) dari oknum masyarakat, kelompok pemuda, atau oknum instansi tertentu, terutama menjelang hari raya. Hal ini menjadi beban biaya informal tambahan di luar perencanaan usaha.

Jika terjadi sengketa atau sengketa lahan peternakan, pelaku usaha di Payakumbuh jauh lebih memilih penyelesaian lewat jalur musyawarah dan kekeluargaan (informal). Jalur hukum formal dihindari karena dianggap memakan waktu lama, rumit, dan menambah biaya operasional. Sejalan dengan penelitian Schwab *et al*., (2020) Ketika proses hukum dianggap lambat, mahal, dan rumit, pelaku usaha cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

B. Sumber Daya

1. Infrastruktur & Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa Pembangunan infrastruktur adalah komponen penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis kewirausahaan. Akses ke jaringan transportasi yang andal, telekomunikasi, pasokan energi, dan fasilitas infrastruktur dasar lainnya sangat penting bagi para wirausahawan untuk beroperasi secara efisien dan mengembangkan bisnis mereka (Perdana *et al.,* 2023). Dalam konteks peternakan di Kota Payakumbuh Infrastruktur merupakan elemen paling dominan yang memengaruhi keberlangsungan operasional harian peternak. Saat ini, terjadi transisi teknologi produksi di mana peternak besar sudah mulai mengadopsi sistem modern *closed house* (kandang tertutup) guna menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Sebagian peternak berada di tahap *semi-modern* (menggunakan blower dan tempat pakan otomatis), sementara peternak kecil masih mengandalkan kandang manual karena keterbatasan modal.

Aktivitas operasional ini sangat bergantung pada utilitas vital seperti listrik (untuk lampu kandang, pompa, dan blower) serta air bersih yang bersumber dari sumur bor. Untuk mengantisipasi risiko pemadaman listrik mendadak dan penurunan debit air saat kemarau,

peternak menyediakan genset secara mandiri. Di sisi pengawasan, usaha yang lebih besar memanfaatkan teknologi *cctv* untuk memantau kondisi kandang secara efisien tanpa harus berada di lokasi, meskipun investasi alat ini relatif mahal dan kerap terkendala ketidakstabilan sinyal internet di area pinggir kota saat cuaca buruk.

Dari sisi distribusi dan komunikasi bisnis, teknologi digital dasar seperti ponsel, aplikasi pesan (*WhatsApp*), dan media sosial (*Facebook*) diadopsi secara aktif. Teknologi ini mempermudah koordinasi pasokan pakan, pemesanan produk secara praktis tanpa tatap muka, dan pemantauan harga telur secara *real-time*. Langkah ini sekaligus menyiasati hambatan infrastruktur fisik, di mana akses jalan di wilayah perkampungan atau pinggir kota sering kali rusak, sempit, dan becek saat musim hujan. Para peternak mengatasinya dengan menggunakan kendaraan operasional pribadi (*pickup*) agar logistik ke agen, warung, dan pengepul tetap berjalan lancar.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) & Pendidikan

Dalam pengelolaan tenaga kerja, para informan sepakat bahwa pengalaman praktik langsung di lapangan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada tingkat pendidikan formal. Pendidikan formal dinilai berkontribusi pada dasar pola berpikir, tata kelola administrasi, dan pencatatan digital perusahaan. Sejalan dengan itu penelitian Birungi *et al*. (2024) Sumber daya manusia didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha atau karyawan mereka

Namun, keahlian teknis dalam merawat ternak, mitigasi risiko penyakit, dan pengambilan keputusan cepat di tengah fluktuasi harga murni dibentuk dari pengalaman operasional nyata di dalam kandang. Tantangan terbesar dalam aspek SDM saat ini adalah sulitnya mencari tenaga kerja yang berkomitmen tinggi dan siap bekerja keras di lingkungan kandang. Terjadi hambatan regenerasi karena generasi muda dinilai kurang berminat pada sektor peternakan dan lebih memilih pekerjaan formal atau kantoran.

3. Keuangan

Sistem keuangan dan permodalan peternak di Payakumbuh masih sangat berpusat pada lembaga perbankan konvensional formal (seperti Bank BRI, Mandiri, BNI) melalui program kredit seperti KUR untuk penambahan modal kandang. Sebaliknya, skema pendanaan alternatif modern seperti *crowdfunding* belum berkembang dan belum dipahami oleh ekosistem lokal. Meskipun demikian, untuk fasilitas transaksi harian, adopsi keuangan digital (Transfer Bank dan QRIS) sudah berjalan sangat baik guna mempercepat proses pembayaran operasional dengan pelanggan. Sejalan dengan penelitian Saprida *et al*., (2024) Modal adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha. Ketersediaan modal yang cukup memungkinkan UMKM untuk melakukan investasi dalam peralatan, bahan baku, dan pemasaran.

Tantangan utama yang dihadapi peternak khususnya skala kecil dan menengah bukanlah ketersediaan akses bank, melainkan ketatnya syarat agunan (jaminan) usaha, proses analisis kredit yang memakan waktu lama (*durasi proses*), serta beban bunga pinjaman. Hal ini diperberat oleh persepsi lembaga keuangan yang masih melihat sektor peternakan sebagai industri berisiko tinggi akibat fluktuasi harga pasar yang ekstrem. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu, Ketersediaan kredit sektor swasta dan modal ventura (*Venture Capital*) memungkinkan bisnis untuk berkembang melampaui tahap subsisten (Erik Stam *et al*., 2026).

4. Akses Pasar & Jaringan Sosial (*Network*)

Akses pasar mengacu pada kemampuan pengusaha untuk menjangkau pelanggan potensial dan memasuki pasar secara efektif (Perdana *et al*., 2023). Dalam konteks penelitian peternakan di Kota Payakumbuh, Akses pasar untuk produk peternakan dari Payakumbuh dinilai relatif terbuka luas berkat lokasi geografis yang strategis. Jangkauan pasar meluas hingga Bukittinggi, Padang, bahkan menembus luar provinsi Sumatera Barat

seperti Riau terutama Pekanbaru, dengan penyerapan produk oleh pasar tradisional, agen, hingga ritel modern. Kendala terbesar di pasar adalah ketidakstabilan harga jual produk dan tren kenaikan harga bahan baku (pakan) yang sering kali menjepit margin keuntungan, ditambah lagi dengan minimnya fasilitas distribusi modern seperti *cold storage* (gudang pendingin) untuk menyimpan persediaan.

Modal sosial memegang peranan krusial bagi keberlanjutan usaha. Hubungan informal dengan keluarga, teman, dan kenalan menjadi penopang modal awal serta basis pelanggan pertama. Jaringan ini kemudian diperluas secara profesional melalui kerja sama dengan supplier pakan dan distributor telur. Para peternak aktif membangun kedekatan industri dengan bergabung dalam kelompok peternak lokal, asosiasi se-Sumatera Barat, serta menghadiri kegiatan *farm meeting* yang diadakan oleh perusahaan swasta. Komunitas-komunitas ini berfungsi efektif sebagai wadah bertukar pengalaman, solusi teknis kandang, dan pembaruan tren harga melalui grup WhatsApp. Hambatan jaringan ke depan terletak pada tantangan menjaga pemenuhan kapasitas produksi yang konsisten serta memelihara rasa saling percaya (*trust*) dan komitmen jangka panjang dengan mitra-mitra baru di luar daerah, Sejalan dengan itu Varun Gupta (2025) mengungkapkan network adalah proses penciptaan hubungan antar aktor (wirausahawan, freelancer, dan mahasiswa) yang dilakukan secara sukarela dan terbuka.

C. Kesimpulan Hasil Penelitian Komparatif

A. Institusi

Tabel 3. Kesimpulan Hasil Penelitian Komparatif Institusi

Institusi	Hasil Temuan Penelitian
Kebijakan Pemerintah	Kebijakan pemerintah di Kota Payakumbuh dinilai memiliki komitmen dalam mendukung usaha peternakan unggas melalui bantuan pakan, pelatihan, pendampingan NIB, serta keringanan administrasi perpajakan. Namun, implementasinya belum merata karena distribusi informasi program masih terbatas dan bantuan bersifat tidak berkelanjutan. Sebagian informan belum pernah memperoleh bantuan sama sekali, sedangkan kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis dipandang membuka peluang pasar baru bagi produk telur.
Pajak	Persepsi terhadap pajak berbeda berdasarkan skala usaha. Peternak skala menengah menganggap tarif pajak sudah sesuai karena mengikuti laba usaha, sedangkan peternak kecil menganggap pajak masih memberatkan akibat fluktuasi harga telur dan tingginya biaya operasional. Digitalisasi pembayaran pajak dinilai mempermudah administrasi, namun masih terdapat kendala berupa gangguan sistem, rendahnya literasi perpajakan, serta lemahnya pencatatan keuangan usaha.
Perizinan dan Birokrasi	Digitalisasi melalui OSS dan Mal Pelayanan Publik mempermudah proses perizinan dibanding sebelumnya. Akan tetapi, birokrasi masih menjadi hambatan karena prosedur yang dianggap rumit, sinkronisasi regulasi antarinstansi yang belum optimal, lamanya proses pada izin tingkat provinsi maupun pusat, serta adanya persepsi bahwa pelaku usaha yang memiliki relasi memperoleh pelayanan lebih cepat.
Budaya Kewirausahaan dan Keberadaan Lembaga Pendidikan serta Inkubator Bisnis	Budaya masyarakat Payakumbuh yang terbiasa berdagang mendorong minat berwirausaha, termasuk di sektor peternakan. Namun, keberanian melakukan ekspansi usaha masih dipengaruhi risiko fluktuasi harga pakan dan ketidakpastian pasar. Lembaga pendidikan memberikan kontribusi melalui inovasi teknologi, penelitian, dan program magang, tetapi kerja sama masih bersifat sementara. Peran inkubator bisnis pemerintah dinilai belum optimal karena belum fokus pada sektor peternakan, sehingga proses pembelajaran lebih banyak diperoleh melalui forum peternak dan perusahaan mitra pakan.
Kualitas Penegakan Hukum dan Tingkat Korupsi	Kondisi keamanan usaha relatif kondusif dan proses pelayanan publik dinilai transparan tanpa adanya praktik korupsi atau suap yang signifikan. Namun, pelaku usaha masih menghadapi biaya informal berupa pungutan liar atau permintaan bantuan dari oknum tertentu. Selain itu, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah karena proses hukum formal dianggap lambat, rumit, dan memerlukan biaya yang tinggi.

B. Sumber Daya

Tabel 4. Kesimpulan Hasil Penelitian Komparatif Sumber Daya

Sumber Daya	Hasil Temuan Penelitian
Infrastruktur	Infrastruktur menjadi faktor yang paling dominan dalam mendukung operasional usaha peternakan unggas di Kota Payakumbuh. Ketersediaan listrik, air bersih, jaringan transportasi, dan fasilitas kandang sangat menentukan kelancaran produksi. Peternak telah mengantisipasi gangguan listrik dengan menyediakan genset serta menggunakan kendaraan operasional pribadi untuk mengatasi kondisi jalan yang sempit, rusak, dan becek, terutama pada musim hujan. Meskipun demikian, kualitas infrastruktur jalan menuju lokasi peternakan masih menjadi kendala distribusi hasil produksi.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengalaman kerja di lapangan dinilai lebih menentukan keberhasilan usaha dibandingkan pendidikan formal. Pendidikan formal berperan dalam meningkatkan kemampuan administrasi, pencatatan keuangan, dan pola pikir manajerial, sedangkan keterampilan teknis diperoleh melalui pengalaman langsung mengelola peternakan. Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah sulitnya memperoleh tenaga kerja yang memiliki komitmen tinggi serta rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor peternakan.
Keuangan	Akses terhadap pembiayaan formal melalui perbankan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), relatif tersedia dan telah dimanfaatkan oleh sebagian peternak untuk pengembangan usaha. Selain itu, transaksi digital seperti transfer bank dan QRIS telah digunakan dalam aktivitas operasional. Namun, pelaku usaha masih menghadapi kendala berupa persyaratan agunan yang ketat, proses pencairan kredit yang cukup lama, beban bunga pinjaman, serta persepsi lembaga keuangan yang menganggap sektor peternakan memiliki risiko usaha yang tinggi.
Teknologi	Pemanfaatan teknologi dalam usaha peternakan menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan skala usaha. Peternak skala besar mulai mengadopsi teknologi modern seperti kandang *closed house*, blower otomatis, CCTV, dan sistem pemberian pakan otomatis, sedangkan peternak kecil masih menggunakan sistem kandang konvensional karena keterbatasan modal. Teknologi digital seperti WhatsApp, Facebook, dan telepon seluler telah dimanfaatkan secara aktif untuk komunikasi, pemesanan produk, koordinasi distribusi, serta pemantauan harga telur secara real-time. Kendala utama yang dihadapi adalah investasi teknologi yang mahal dan kualitas jaringan internet yang belum stabil.
Akses Pasar	Akses pasar produk peternakan dinilai cukup terbuka karena letak geografis Kota Payakumbuh yang strategis. Produk dipasarkan hingga Bukittinggi, Padang, Riau, dan Pekanbaru melalui agen, pasar tradisional, maupun ritel modern. Meskipun demikian, pelaku usaha masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga telur, kenaikan harga pakan, serta keterbatasan fasilitas distribusi modern seperti *cold storage* yang menyebabkan penyimpanan produk belum optimal.
Network / Modal Sosial	Modal sosial menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha. Hubungan dengan keluarga, teman, serta relasi bisnis berperan sebagai sumber modal awal, pelanggan pertama, dan sarana memperoleh informasi usaha. Jaringan usaha juga dibangun melalui kerja sama dengan supplier pakan, distributor telur, kelompok peternak, asosiasi peternak, serta kegiatan *farm meeting*. Forum tersebut menjadi media pertukaran informasi mengenai teknologi, harga pasar, dan solusi teknis. Tantangan ke depan adalah menjaga kepercayaan (*trust*), komitmen kerja sama, dan kemampuan memenuhi kapasitas produksi secara konsisten untuk mempertahankan hubungan dengan mitra usaha.

KESIMPULAN

Ekosistem kewirausahaan institusi pada industri peternakan unggas di Kota Payakumbuh secara umum telah bergerak ke arah yang lebih modern, terbuka, dan adaptif, namun efektivitasnya dalam mendorong kesuksesan usaha masih dibatasi oleh berbagai hambatan struktural, prosedural, dan kapasitas internal pelaku usaha. Dinamika interaksi antara pelaku usaha dengan pilar-pilar institusional menunjukkan bahwa transformasi kebijakan fiskal, perizinan, dan penegakan hukum berbasis digital belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan distribusi informasi serta kesiapan teknis di lapangan. Akibatnya, manifestasi dari

kebijakan eksternal tersebut cenderung dipersepsikan secara beragam, di mana pelaku usaha skala menengah telah mampu mengadopsi sistem secara adaptif, sementara pelaku usaha skala kecil/rumahan masih terjebak dalam pusaran kendala administrasi, keterbatasan literasi regulasi, dan kerentanan terhadap gejolak ekonomi pasar.

Rangkuman mendalam terhadap pilar kebijakan pemerintah mengonfirmasi bahwa intervensi secara makro, baik yang berbentuk penerima bantuan maupun penerima insentif, memberikan stimulasi kapasitas jangka pendek bagi keberlanjutan usaha peternakan. Namun, manfaat tersebut belum berdampak secara berkelanjutan akibat adanya pendampingan terbatas pasca pelatihan, belum optimalnya sosialisasi kebijakan, serta minimnya sinkronisasi regulasi antar instansi yang sering kali memicu tumpeng tindih prosedur administrasi. Pelaku usaha dituntut melakukan adaptasi kebijakan secara mandiri di tengah tingginya biaya kepatuhan seperti biaya pemenuhan standar fasilitas lingkungan dan kesehatan ternak serta rendahnya pemahaman regulasi karena penggunaan istilah teknis yang kompleks. Bagi kelompok non penerima bantuan, hambatan administrasi dan keterbatasan akses kebijakan menjadi determinan utama yang mengisolasi mereka dari program resmi pemerintah, sehingga operasional usaha sepenuhnya bertumpu pada modal pribadi yang rentan terhadap fluktuasi kebijakan ekonomi terkait stabilitas harga bahan baku dan pakan di pasar.

Pada dimensi perpajakan, terbentuk polarisasi persepsi wajib pajak yang bersumber dari skala usaha dan literasi fiskal pelaku peternakan. Kelompok usaha yang lebih mapan memiliki persepsi tarif pajak wajar karena mekanismenya yang proporsional mengikuti laba bersih, serta mengakui adanya kemudahan pembayaran yang dimediasi oleh digitalisasi sistem online dan dukungan staf administrasi internal. Sebaliknya, kelompok usaha kecil mengonstruksikan persepsi tarif pajak mahal sebagai akibat langsung dari pendapatan yang fluktuatif, keterbatasan informasi, dan minimnya edukasi formal perpajakan. Meskipun kebijakan insentif pajak (seperti keringanan pada masa pandemi) terbukti efektif mengurangi beban fiskal secara situasional bagi penerima insentif, mayoritas pelaku usaha nyatanya masih berada pada kategori tanpa insentif. Lebih lanjut, kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ini secara kolektif dihambat oleh dua faktor utama, yaitu kendala perpajakan yang bersifat eksternal berupa hambatan sistem digital (error teknis) serta hambatan prosedur yang rumit, dan kendala internal berupa lemahnya kapasitas manajemen keuangan dalam melakukan pencatatan arus kas secara tertib dan akurat.

Transformasi tata kelola perizinan dan birokrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan pelayanan satu pintu di Mall Pelayanan Publik (MPP) secara substantif telah menghapuskan biaya resmi (pungutan formal) sehingga biaya perizinan dirasakan relatif sebagai biaya ringan. Selanjutnya efisiensi ini belum terwujud secara absolut karena durasi pengurusan izin teknis (seperti izin lingkungan dan tata ruang) masih memerlukan waktu yang panjang dan berjenjang. Hambatan prosedur dan ketidakpastian biaya non-formal justru muncul dari besarnya biaya berat untuk pemenuhan persyaratan teknis lapangan, transportasi, dan penyesuaian fasilitas usaha. Di sisi lain, aspek integritas aparat telah mengalami peningkatan integritas yang signifikan seiring berkurangnya ruang interaksi langsung akibat digitalisasi, walaupun kinerja kecepatan pelayanan belum sepenuhnya optimal dan kejelasan prosedur serta transparansi pelayanan masih menyisakan kesan bias akibat adanya pengaruh akses informal (relasi internal) yang mempercepat tindak lanjut beberapa oknum pelaksana. Kondisi ketidakpastian layanan ini pada akhirnya memicu resistensi bagi UMKM rumahan, yang memilih menunda legalitas usaha dan tetap beroperasi di sektor informal.

Ditinjau dari pilar budaya kewirausahaan, keberadaan lembaga pendidikan, dan inkubator bisnis, ekosistem lokal menunjukkan pertumbuhan motivasi mandiri yang kuat, yang tercermin pada meningkatnya keberanian mengambil risiko dan tumbuhnya inovasi berbasis digital marketing maupun efisiensi kandang modern di kalangan generasi muda. Kurikulum kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan yang diusung oleh lembaga pendidikan (perguruan tinggi) di Sumatera Barat diakui telah berkontribusi nyata dalam mentransfer

pengetahuan teknis dan menyediakan program magang mahasiswa. Namun, kontribusi ini masih bersifat parsial dan temporer, belum bermutasi menjadi pendampingan usaha yang terstruktur dan jangka panjang. Kelemahan mendasar terletak pada fungsi inkubator bisnis yang dominan digerakkan oleh kemitraan swasta industri pakan dan belum menyentuh sektor peternakan secara spesifik, sehingga akses mentoring profesional masih sangat terbatas. Hambatan modal dan keterbatasan hambatan skill (manajemen finansial dan penguasaan teknologi) tetap menjadi faktor penahan utama yang membuat pelaku usaha cenderung bersikap konservatif dan kesulitan menjaga konsistensi usaha saat dihadapkan pada gejolak harga pasar.

Sebagai kesimpulan integratif, kualitas tata kelola hukum dan penegakan hukum di Kota Payakumbuh secara umum telah mampu memberikan landasan dasar bagi perlindungan usaha dan rasa aman bagi pelaku peternakan yang telah memiliki legalitas formal. Meskipun tingkat keterbukaan informasi publik mengalami perbaikan melalui platform daring, efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di lapangan dinilai belum sepenuhnya konsisten dan merata. Karakteristik penyelesaian masalah sengketa usaha di tingkat lokal masih sangat bergantung pada mekanisme informal, seperti musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, demi menghindari kompleksitas hukum formal. Fenomena praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik suap secara eksplisit tidak ditemukan dalam sistem pelayanan birokrasi formal, namun manifestasinya bergeser menjadi tekanan informal berupa maraknya pungutan liar, biaya informal, serta permintaan sumbangan situasional dari entitas non-pemerintah. Inkonsistensi informasi dan adanya beban biaya non-operasional ini, apabila berakumulasi dengan hambatan prosedural birokrasi dan ketidakpastian ekonomi pasar, secara simultan bertindak sebagai faktor penghambat utama yang mengondisikan ekosistem kewirausahaan institusional belum mampu mendorong kesuksesan usaha peternakan unggas secara optimal dan berkeadilan.

Ekosistem kewirausahaan sumber daya pada usaha peternakan secara umum telah terbentuk sebagai sebuah sistem penunjang operasional yang saling berkaitan, namun tingkat optimalitas perilakunya masih bervariasi antara kapasitas konvensional dan transisi modern. Keberlangsungan dan pertumbuhan sektor ini sangat ditentukan oleh integrasi dinamis antara kesiapan infrastruktur fisik, kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, perluasan akses pasar, kekuatan relasi modal sosial, serta ketersediaan akses sistem keuangan wilayah. Keterpaduan seluruh komponen sumber daya tersebut menjadi fondasi utama dalam meminimalkan hambatan lapangan serta menentukan efisiensi dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

Hasil menunjukkan bahwa pada dimensi infrastruktur, aspek dasar berupa stabilitas listrik dan kecukupan pasokan air secara umum telah terpenuhi dengan baik, meskipun risiko musiman seperti penurunan debit air saat kemarau dan gangguan pemadaman mendadak tetap memerlukan mitigasi operasional. Pada aspek distribusi, akses jalan dan transportasi merupakan penentu kelancaran distribusi barang, di mana kendala fisik berupa kerusakan infrastruktur jalan di beberapa titik serta hambatan musiman saat intensitas hujan tinggi menjadi faktor pembatas utama yang meningkatkan risiko keterlambatan dan biaya angkut. Sebagai langkah adaptasi, kepemilikan kendaraan operasional internal terbukti efektif meminimalkan hambatan tersebut guna menjaga stabilitas penyaluran produk. Adapun pada aspek fasilitas produksi, terdapat segmentasi kapasitas yang nyata antara sistem konvensional berskala manual, sistem transisi semi modern, hingga penerapan teknologi modern terintegrasi seperti kandang tertutup (*close house*), yang secara langsung memengaruhi produktivitas bisnis dan efisiensi pengelolaan usaha.

Tingkat adopsi teknologi dan pemanfaatan internet dan telekomunikasi memperlihatkan pola yang selaras dengan kapasitas fasilitas produksi tersebut. Digitalisasi bisnis sebagian besar masih berada pada tahap pemanfaatan dasar, yakni terfokus pada aktivitas komunikasi rutin dengan pemasok atau konsumen, pencatatan stok sederhana, dan perluasan jangkauan promosi usaha melalui media sosial demi percepatan pelayanan transaksi. Efisiensi bisnis dari

transformasi digital ini belum merata ke seluruh lini administrasi internal akibat hambatan teknologi berupa keterbatasan keandalan jaringan di area tertentu serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan instrumen yang lebih mutakhir. Kualitas sumber daya manusia itu sendiri dibentuk oleh akumulasi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat keterampilan praktis, di mana produktivitas kolektifnya masih sering dibatasi oleh keterbatasan pelatihan formal yang terstruktur di industri peternakan.

Keterbatasan kapasitas internal tersebut kemudian berimplikasi langsung pada perluasan akses pasar dan penentuan segmen pasar. Jalur distribusi pasar saat ini masih didominasi oleh pasar tradisional dan jaringan agen atau pengepul lokal karena ketatnya persyaratan administratif untuk menembus pasar ritel modern. Meskipun lembaga penyedia informasi formal belum merata, informasi pasar yang krusial seperti pergerakan harga dan fluktuasi permintaan tetap tersedia melalui jaringan informal sesama pelaku usaha dan komunitas. Namun, hambatan akses pasar berupa ketidakstabilan harga pasar, kenaikan harga bahan baku pakan, fluktuasi harga BBM, serta keterbatasan kapasitas fasilitas distribusi fisik seperti gudang penyimpanan (*cold storage*) menjadi tantangan utama yang membatasi fleksibilitas ekspansi luar daerah. Guna mengatasi keterbatasan pasar ini, kekuatan modal sosial melalui penguatan jaringan industri dan relasi profesional menjadi instrumen vital untuk mengamankan peluang pasar dan menjaga pasokan. Hanya saja, efektivitas jaringan eksternal ini masih menghadapi hambatan relasi akibat tingginya persaingan harga serta tantangan mendasar dalam membangun saling percaya antar mitra bisnis. Terakhir, dimensi pembiayaan melalui ketersediaan fasilitas kredit usaha dari lembaga keuangan juga belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan ini disebabkan oleh hambatan sistem keuangan konvensional yang mencakup beratnya persyaratan administrasi, kewajiban penyediaan agunan usaha yang memadai, durasi proses pencairan, serta tingginya penilaian risiko usaha di sektor peternakan.

Secara integrasi, kesimpulan penelitian ini menegaskan adanya hubungan kausalitas yang kuat antar variabel dalam ekosistem kewirausahaan sumber daya. Keterbatasan modal finansial memicu hambatan sistem keuangan yang menyebabkan lambatnya modernisasi fasilitas produksi dan rendahnya kapasitas teknologi operasional kandang. Keterbatasan teknologi dan minimnya pelatihan SDM ini pada akhirnya menciptakan hambatan kapasitas produksi yang menghalangi pelaku usaha untuk menembus segmen pasar ritel modern yang lebih menguntungkan. Di tengah rantai keterbatasan internal tersebut, kepemilikan kendaraan operasional logistik secara mandiri serta pemanfaatan modal sosial berbasis kepercayaan terbukti menjadi katup penyelamat operasional yang menjaga kelancaran distribusi barang dan stabilitas usaha di tengah buruknya infrastruktur fisik luar. Oleh karena itu, makna umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekosistem kewirausahaan sumber daya peternakan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinkronisasi antara perbaikan infrastruktur publik, digitalisasi rantai pasok yang tersedia, penajaman keterampilan SDM, serta penyederhanaan akses pembiayaan guna mendorong transisi pelaku usaha menuju skala industri yang modern, adaptif, dan berdaya saing luas.

REFERENSI

Akhmaddhian, S. (2014). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor). Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 16(2), 206-214.

Akmalia, F., Kamil, M. F., Dealova, M. P., & Novita, Y. (2025). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Di Indonesia. *Journal Education, Sociology and Law*, *1*(1), 590-595.

Antara News. (2021, 25 Desember). Ketua DPRD Sumbar Dorong Peternak Di Kota Payakumbuh Berkembang. Diambil Dari Antara News Sumatera Barat

Antara News. (2024, 16 September). Sumbar Salurkan Satu Juta Unggas Untuk Bantu Perekonomian Masyarakat. DiaksesDari https://Www.Antaranews.Com/Berita/4337183/Sumbar-Salurkan-Satu-Juta-Unggas-Untuk-Bantu-Perekonomian-Masyarakat

Birungi, H., Mbidde, CI, Mutunzi, AK, & Kiwaala, Y. (2024). Pilar Ekosistem Kewirausahaan Dan Kinerja UKM Di Sektor Manufaktur Uganda. *Jurnal Etika Dalam Kewirausahaan Dan Teknologi*, *4* (2), 145-173.

Gemina, D., Sudarijati, S., Kartini, T., & Aditya, MF (2024). Keberhasilan Usaha Berbasis Jiwa Kewirausahaan Dan Keunggulan Bersaing. *Jurnal Visionida*, *10* (2), 129-135.

Judijanto, L., Kumalasari, N., Mahmuddin, & Suyono, W. P. (2025). The Effect of Business Incubation, Social Capital, And Financial Support on Startup Performance in Indonesia. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, *3*(01), 22–29

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, 14 Maret). *Pemerintah Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Yang Berorientasi Pada Nilai Tambah Dan Pemanfaatsan Teknologi*. Ekon.Go.Id. https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/3677/Pemerintah-Perkuat-Ekosistem-Kewirausahaan-Yang-Berorientasi-Pada-Nilai-Tambah-Dan-Pemanfaatan-Teknologi

Mason, C., & Brown, R. (2014). Ekosistem Kewirausahaan Dan Kewirausahaan Berorientasi Pertumbuhan. Laporan Akhir Kepada OECD, Paris, 30 (1), 77-102.

Novela, S., Syarief, R., Fahmi, I., & Arkeman, Y. (2021). Creating A University-Based Entrepreneurial Ecosystem in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, *10*(1), 174-174.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/OJK-Dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.Aspx

Perdana, M. A. C., Sihombing, T. M., Chrisinta, D., Sahala, J., & Budaya, I. (2023). Pengaruh Dukungan Pemerintah, Infrastruktur, Dan Akses Pasar Terhadap Pertumbuhan Usaha Kewirausahaan Di Wilayah Perkotaan. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *1*(03), 149-161.

Prasannath, V., Adhikari, R. P., Gronum, S., & Miles, M. P. (2024). Impact of government support policies on entrepreneurial orientation and SME performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*, *20*(3), 1533-1595.

Saprida, E., Suhada, S., Zahwani, S. T., Hafiz, A., & Nurbaiti, N. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN BISNIS PADA UMKM ZHAFIRA POPCORN. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 117-128.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th Ed.). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th Ed.). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.

Schwab, K., & Zahidi, S. (2020). *The Global Competitiveness Report How Countries are Performing on the Road to Recovery*. www.weforum.org